

2024

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2024 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Perikanan Budidaya. LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2024 ini mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyesuaikan dengan DJPB KKP berikut pencapaian IKU melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 oleh masing-masing kelompok kerja yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan III Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan perikanan budidaya di masa mendatang.

Lombok Barat, 18 Oktober 2024

**Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**



**Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKTUIF .....	8
BAB 1. PENDAHULUAN.....	12
1.1.LATAR BELAKANG .....	12
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN .....	12
1.3.TUGAS DAN FUNGSI.....	12
1.4.ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA .....	15
1.5.SISTEMATIKA LKJ.....	16
BAB 2.PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....	18
2.1.RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024 .....	18
2.1.1.VISI.....	8
2.1.2.MISI.....	18
2.1.3.TUJUAN.....	18
2.1.4.SASARAN KEGIATAN .....	19
2.1.5.STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	20
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN.....	22
2.3.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	23
2.4.PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024 .....	24
BAB 3.AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	26
3.2.ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	32
3.3.CAPAIAN KINERJA ANGGARAN .....	72
3.4.EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	72
BAB 4.PENUTUP.....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024.....	29
Tabel 2. Nilai PNBP BPBL Lombok.....	36
Tabel 3. Grafik Nilai PNBP BPBL Lombok.....	36
Tabel 4. Perbandingan realisasi PNBP antar UPT.....	37
Tabel 5. Bantuan calon induk yang disalurkan.....	39
Tabel 6. Perkembangan penyaluran bantuan Calon Induk.....	40
Tabel 7. Perbandingan antar sub unit kerja.....	40
Tabel 8. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat.....	42
Tabel 9. Prosentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat.....	43
Tabel 10. Perkembangan penyaluran bantuan benih.....	44
Tabel 11. perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut.....	44
Tabel 12. Realisasi Produksi Calon Induk Unggul.....	45
Tabel 13. Capaian produksi calon induk unggul.....	47
Tabel 14. Perkembangan Calon Induk Unggul yang diproduksi.....	47
Tabel 15. perbandingan capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi antar sub unit kerja UPT Laut.....	47
Tabel 16. Capaian bantuan bibit Rumput Laut.....	49
Tabel 17. Perkembangan penyaluran bantuan bibit Rumput Laut.....	50
Tabel 18. Perbandingan antar UPT Laut DJPB.....	51
Tabel 19. Rekapitulasi Bantuan KBRL.....	52
Tabel 21. Perkembangan penyaluran bantuan KBRL.....	56
Tabel 22. Perbandingan antar UPT Laut DJPB.....	57
Tabel 24 Perbandingan prosentase Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan.....	67
Tabel 25. Realisasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias.....	68
Tabel 26. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	71
Tabel 27. Prosentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan.....	72
Tabel 28. Perkembangan pengujian Sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	72
Tabel 32. Perkembangan pengujian sampel AMR.....	78
Tabel 33. Perbandingan Persentase pengujian sampel AMR.....	79
Tabel 37. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan.....	87
Tabel 38. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.....	88

Tabel 39. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB ..... 88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per September 2024 .	16
Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2024 .....	16
Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	27
Gambar 4. Screenshot aplikasi Kinerjaku.....	28
Gambar 5. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat.....	43
Gambar 6. Dokumentasi Penyaluran bantuan Bibit Rumput Laut .....	50
Gambar 7. Penyerahan Bantuan bibit rumput laut.....	50
Gambar 7. Bantuan KBRL.....	56
Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi.....	66
Gambar 10. Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Ikan Hias .....	69
Gambar 11. Dokumentasi pengambilan sampel .....	71
Gambar 11. Website Ropeg IP ASN 2024.....	81
Gambar 12. Dokumentasi kegiatan bimtek dan sosialisasi SAKIP .....	85
Gambar 13. Screenshot aplikasi OMSPAN .....	100
Gambar 14. Screenshot aplikasi SMART DJA .....	101

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memuat rencana, capaian dan realisasi anggaran dan kegiatan BPBL Lombok pada Triwulan III Tahun 2024. Berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2024 yang ditetapkan pada bulan Januari 2024, maka telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh satker BPBL Lombok terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap Sasaran Strategis sebagaimana berikut :

Sasaran Kegiatan 1, yaitu : “Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ” didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu : (i) Nilai PNBP Satuan Kerja BPBL Lombok

Sasaran Kegiatan 2, yaitu : ”Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan” didukung oleh 8 (delapan) IKU, yaitu : (i) Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat (ii) Persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat (iii) Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi (iv) Persentase Bantuan Bibit Ruumput Laut yang disalurkan ke masyarakat (v) Persentase Bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat (vi) Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan (vii) Persentase diseminasi teknologi Budi Daya Ikan (viii) Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan

Sasaran Kegiatan 3, yaitu : “Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan” didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu: (i)

Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan; (ii) Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi; (iii) Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR).

Sasaran Kegiatan 4, yaitu : “Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok” didukung oleh 13 (tiga belas) IKU yaitu (i) Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Lombok; (ii) Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK; (iii) prosentase penyelesaian LHP BPK atas satker BPBL Lombok; (iv) Nilai PM SAKIP BPBL lombok; (v) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ; (vi) nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok ; (vii) NKA lingkup satker BPBL lombok; (viii) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok ,(ix) Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok, (x) Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA, (xi) Indeks Pengelolaan kepegawaian, (xii) Nilai Pengawasan Kearsipan, (xiii) Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dari 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan III Tahun 2024, yaitu :

1. Nilai PNBK BPBL Lombok sebesar Rp. 1.046.684.993 dari target Rp 567.185.000;
2. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi sebanyak 2.196 ekor dari target 770 ekor;
3. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan sebesar 288,50% dari target 60%;
4. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) sebesar 77,14% dari target 70%;
5. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok sebesar 84,46 dari target 80;

6. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 96% dari target 80%;

Sementara terdapat 19 (Sembilan belas) indikator yang belum bisa dihitung pada semester II atau akhir Tahun 2024, yaitu :

1. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat;
2. Persentase bantuan benih yang disalurkan;
3. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat
4. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat;
5. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang dimanfaatkan;
6. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan;
7. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan;
8. Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi;
9. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
10. prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok;
11. Nilai PM SAKIP BPBL lombok;
12. NKA lingkup satker BPBL lombok;
13. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok
14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok;
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
16. Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
17. Indeks Pengelolaan kepegawaian;
18. Nilai Pengawasan Kearsipan.

19. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok;

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2024, dapat diketahui bahwa semua indikator tercapai sesuai target, namun demikian tetap harus dilakukan monitoring terutama untuk capaian tahunan supaya realisasi dapat memenuhi target kinerja Tahun 2024.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan penyusunan target kinerja Tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dan kemudian dituangkan dalam LKj Triwulan III Tahun 2024. LKj BPBL Lombok ini menginformasikan *input, output, outcome, dan benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2024.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2024 yaitu : (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBL Lombok kepada seluruh *stakeholders*; (ii) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja BPBL Lombok

Triwulan III Tahun 2024; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

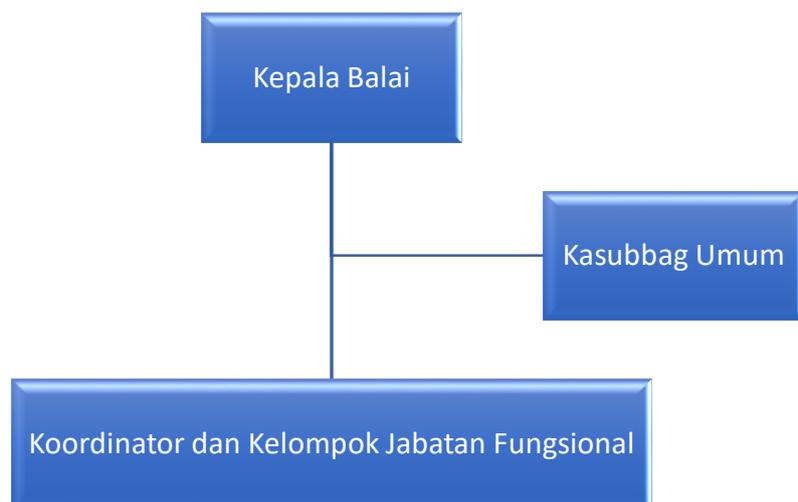
BPBL Lombok bertugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi BPBL Lombok terdiri dari :

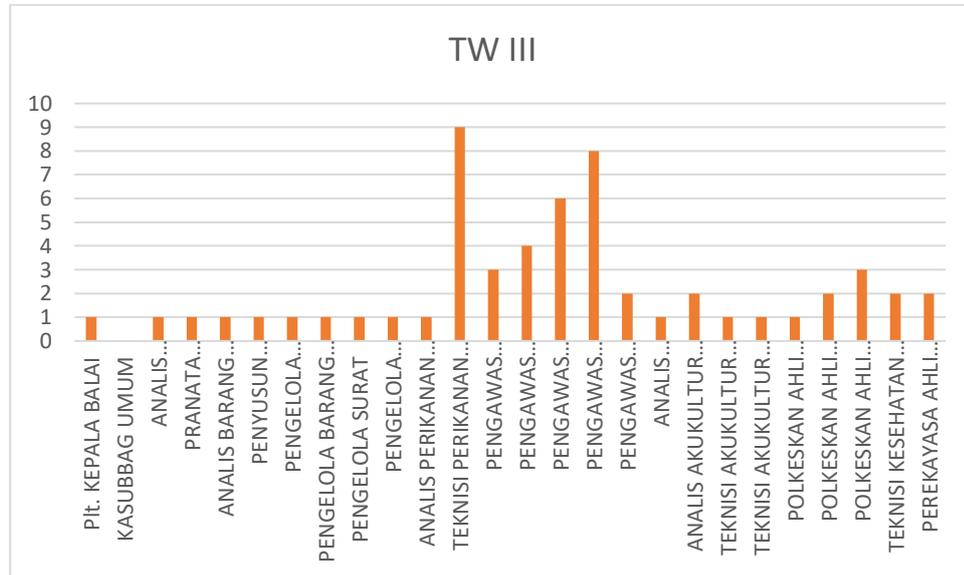
1. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi BPBL Lombok tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :

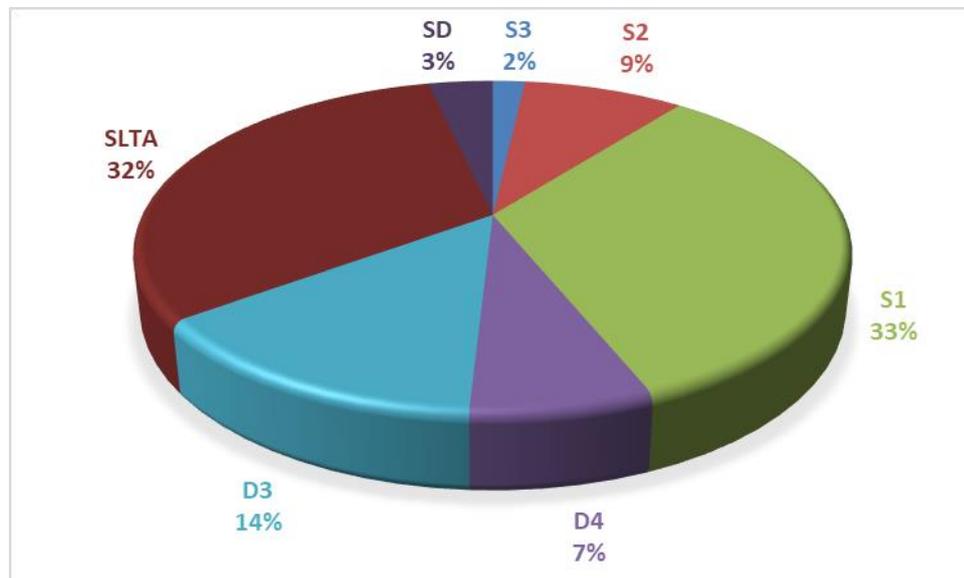


**Gambar 1.** Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Per September Tahun 2024

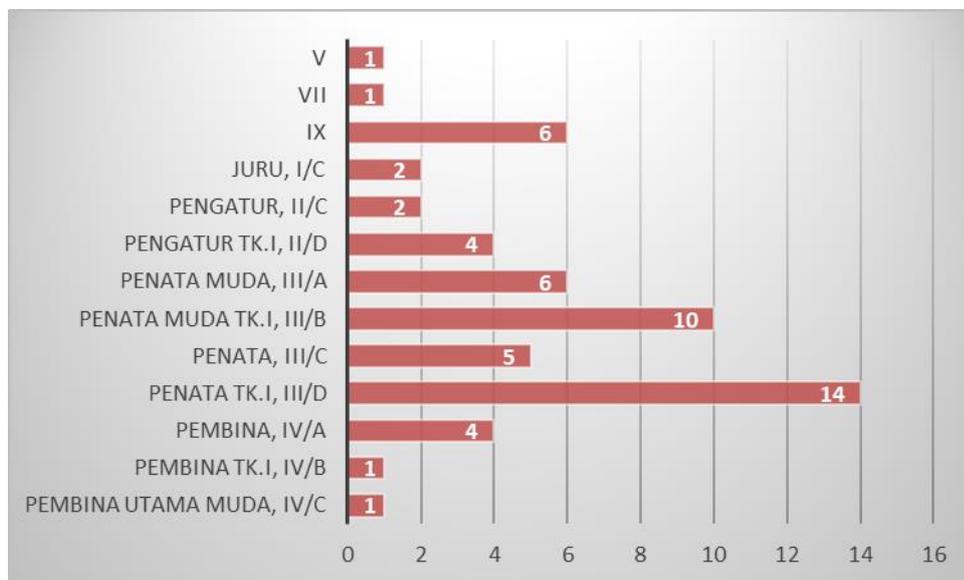
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok didukung oleh SDM sejumlah 57 orang dengan rincian sejumlah 49 orang ASN dan 7 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per September 2024



Gambar 1. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per September 2024



Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Maret 2024

## 1.4. Isu Strategis (*Strategic Issued*) dan Permasalahan Utama

### 1.4.1. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut

Budidaya laut (*Marine Culture*) di Indonesia merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai kontribusi penting dalam memenuhi target produksi perikanan. Potensi sumber daya perikanan budidaya laut khususnya di Propinsi NTB dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: rumput laut, mutiara, lobster, kerapu, kakap dan bawal bintang (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB). Lebih lanjut lagi data statistik perikanan budidaya di Propinsi NTB diketahui pada tahun 2021, potensi areal budidaya laut seluas 171.010,51 hektar dengan jumlah Rumah Tangga Produksi berjumlah 10.033 unit.

Dalam pengembangan budidaya laut di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bali, NTT, dan Papua) khususnya di propinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPBL Lombok terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) harga pakan untuk komoditas ikan laut sangatlah tinggi (pakan segar dan pakan buatan); (ii) penyakit; (iii) akses permodalan yang terbatas karna ketidak stabilan produksi dan resiko kegagalan yang tinggi; (iv) standar kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan; (v) tingkat kelulushidupan (SR) biota yang dipelihara saat panen yang masih rendah karena berbagai macam faktor mulai dari lingkungan budidaya, tidak konsistennya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) hingga kualitas benih yang masih rendah dari segi pertumbuhan.

Selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi BPBL Lombok dalam pengembangan budidaya ikan air laut, diantaranya: (i) pengembangan teknologi budidaya dari jenis kekerangan, ikan bersirip dan juga lobster yang bernilai ekonomis tinggi belum optimal dilakukan; (ii) keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan SDM; dan (iii) wilayah kerja yang sangat luas.

#### 1.4.2. Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di BPBL Lombok

Secara umum, permasalahan-permasalahan/ kendala yang dihadapi pada Triwulan III Tahun 2024 di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, diantaranya :

1. Belum tuntasnya rekomendasi Inspektorat Jendera;
2. Belum terlaksananya kegiatan bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat
3. Belum adanya pegawai dengan jabatan arsiparis di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;

#### 1.5. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Perikanan Budiaya Laut Triwulan III Tahun 2024 . LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Triwulan III Tahun 2024 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2024 , permasalahan yang dihadapi, dan upaya mengatasi hal tersebut.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBL Lombok serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBL Lombok, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan tapja yang memuat sasaran kegiatan berikut indikator kinerja utama (IKU) pada Triwulan III Tahun 2024 .
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBL Lombok serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.

5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama.

## **BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

### **2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020 – 2024**

#### **2.1.1. Visi**

Visi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu : “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

#### **2.1.2. Misi**

Misi yang akan dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu :

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional.
2. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

#### **2.1.3. Tujuan**

Tujuan pembangunan perikanan budidaya yaitu :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;

- b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan;  
dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di UPT BPBL Lombok, yakni meningkatkan kinerja reformasi birokrasi sebagai UPT Dirketorat Jenderal Perikanan Budidaya.

#### 2.1.4. Sasaran Kegiatan

Tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya laut akan dicapai melalui sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Nilai PNBP Satuan Kerja BPBL Lombok
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
  - a. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat;
  - b. Persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat;
  - c. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi;
  - d. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat;
  - e. Persentase Bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat;
  - f. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan;
  - g. Persentase diseminasi teknologi Budi Daya Ikan ;

- h. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
    - a. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan ;
    - b. Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi;
    - c. Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR).
  4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
    - a. Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Lombok;
    - b. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK;
    - c. prosentase penyelesaian LHP BPK atas satker BPBL Lombok;
    - d. Nilai PM SAKIP BPBL lombok;
    - e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
    - f. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok ;
    - g. NKA lingkup satker BPBL lombok;
    - h. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok ;
    - i. Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok;
    - j. Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
    - k. Indeks Pengelolaan kepegawaian ;
    - l. Nilai Pengawasan Kearsipan;
    - m. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok

### 2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi BPBL Lombok untuk berkontribusi langsung mengambil bagian untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya Tahun 2020-2024 adalah dengan mengimpelmentasikan kegiatan-kegiatan prioritas DJPB sebagai berikut :

a. Aspek sosial ekonomi:

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penyaluran bantuan induk unggul dan benih bermutu kepada kelompok pembudidaya untuk menghidupkan kembali usaha budidaya skala kecil, serta mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat untuk membantu kontinuitas usaha kelompok penerima bantuan tersebut;
- Penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya, antara lain bibit/benih, pakan, obat ikan dan vitamin, pupuk serta peralatan, sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
- Pengembangan kebun bibit rumput laut melalui pemberian bantuan bibit bermutu di kawasan sentra kebun bibit rumput laut.

b. Aspek teknologi produksi:

Meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi serta pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
- Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menghasilkan unit pembenihan bersertifikat;

- Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk menghasilkan pembudidaya (pembesaran ikan) bersertifikat;
- Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut dengan sistem Kultur Jaringan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
- Pengembangan sentra budidaya baru berbasis kawasan/klaster, dimana salah satu gebrakan KKP adalah pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal ini, Ditjen Perikanan Budidaya ditugaskan untuk mengawal 3 kawasan SKPT, yaitu Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
- Pelaksanaan budidaya lele sistem bioflok, yaitu teknologi budidaya lele intensif dengan mengandalkan suplai oksigen dan gumpalan (flok) mikroorganisme tertentu. Untuk tahap awal, fokus kegiatan bioflok dilakukan di pesantren, untuk kemudian diperluas ke wilayah lain. Tujuan bioflok adalah meningkatkan ketahanan pangan, memenuhi gizi protein santri, meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta perekonomian pesantren dan masyarakat
- Pengembangan sarana input produksi inovatif di UPT Pusat, misalnya protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.

c. Aspek sumber daya alam dan lingkungan:

Mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penerapan perekayasa teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
- Pengembangan Culture Based Fisheries (CBF) dengan pendekatan komoditas

multitrophic level.

- Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
- Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;

## 2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan III Tahun 2024 difokuskan pada program pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pengelolaan perbenihan ikan
2. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dimana dalam mencapai hal tersebut, telah didistribusikan melalui Klasifikasi Rincian Output yaitu : (i) Bantuan peralatan/sarana; (iii) Bantuan hewan; (iv) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan ; (v) Penyidikan dan Pengujian Penyakit; (vi) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (vii) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; (viii) Layanan dukungan manajemen internal; (ix) layanan manajemen SDM internal; (x) layanan manajemen kinerja internal.

Dalam mendukung rencana kerja tersebut, BPBL Lombok mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 sebesar **Rp. 28.057.854.000- (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

- a. Pengelolaan perbenihan ikan sebesar Rp. 3.846.476.000
- b. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan sebesar Rp. 461.289.000
- c. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp. 11.610.000.000

d. Dukungan manajemen internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar  
Rp. 12.140.089.000

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, penetapan kinerja BPBL Lombok tahun 2024. Berikut adalah perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id), SUREL [df@kp.go.id](mailto:df@kp.go.id)

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**  
Jabatan : **PtL Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**  
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budidaya**  
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
  
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
PtL Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut  
Lombok  
  
Wawan Cahyono Ashuri

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

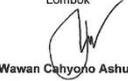
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	1. Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rupiah)	781.085.000
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	4. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	3.476
	5. Persentase Bantuan Bibit Rumpul Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	6. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumpul Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
	7. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (Persen)	100
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang	8. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (Persen)	100
	9. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan (Persen)	100
	10. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	7
	12. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Persen)	85
	14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	15. Prosentase Penyelesaian LHP BPK Atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	100
	16. Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	82
	17. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	80
	18. Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	93,76
	19. NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	86
	20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80
	22. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Terintegrasi dengan Data KUSUKA (Persen)	80
	23. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
	24. Nilai Pengawasan kearsipan (Nilai)	75
	25. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok (Persen)	80

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
  
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Pit. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok  
  
Wawan Cahyoro Ashuri

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.946.476.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	461.289.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	12.150.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijien Perikanan Budidaya	12.140.089.000
<b>Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok Tahun 2024</b>		<b>28.597.854.000</b>

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
  
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Pit. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok  
  
Wawan Cahyoro Ashuri

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## 2.4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU)+IKM Pada Triwulan III Tahun 2024 ini adalah sebesar 119,02 % atau masuk dalam kategori ISTIMEWA (Biru). Berikut adalah hasil hasil *Screenshot* dari aplikasi Kinerjaku BPBL Lombok.

Capaian Kinerja IKU								Warna	Keterangan
	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4	s/d TW4		
Skor Capaian	👍👍 120,00 Q	👍👍 115,00 Q	👍👍 115,00	👍👍 119,02 Q	👍👍 119,02	0,00	0,00	Istimewa	nilai 110 - 120
Skor Verifikasi	👍👍 120,00 Q	👍👍 115,00 Q	👍👍 115,00	👍👍 119,02 Q	👍👍 119,02	0,00	0,00	Baik	nilai 90 - <110
								Cukup	nilai 70 - <90
								Kurang	nilai 50 - <70
								Sangat Kurang	untuk nilai <50
								Belum ada penilaian	

Gambar 4. Screenshot aplikasi Kinerjaku

### BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, berdasarkan sistem aplikasi Kinerjaku, diperoleh Nilai sebesar 115%. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET TW III	REALISASI TW III	Realisasi Terhadap Target TW III (%)	Realisasi terhadap Target 2024 (%)
Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok	Nilai PNBP yang diperoleh (Rupiah)	781,085,000	Rupiah	567,185,000	1,046,684,993	184.54%	134.00%
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (Persen)	75	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan benih yang disalurkan (Persen)	75	Prosentase	0	0	100.00%	0.00%

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi (ekor)	3,476	ekor	770	2196	200.00%	63.18%
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat (persen)	75	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat (persen)	75	Prosentase	0	-	0.00%	0.00%
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang dimanfaatkan (Persen)	100	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase diseminasi teknologi budi daya ikan (Persen)	100	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan (Persen)	100	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%

Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Bidang Kawasan dan kesehatan ikan	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100	Prosentase	60	288.5	100.00%	288.50%
Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Bidang Kawasan dan kesehatan ikan	Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi (parameter)	7	Parameter	0	0	0.00%	0.00%
Meningkatnya kualitas Pengendalian kesehatan ikan	Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) (%)	100	Prosentase	70	77.14	0.00%	77.14%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Lombok (Indeks)	85	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Lombok (Persen)	100	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai PM SAKIP BPBL Lombok (Nilai)	82	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok (Persen) kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	80	Prosentase	80	96	120.00%	120.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	93.76	nilai	0	0	0.00%	0.00%

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Kinerja Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	86	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok (Nilai)	80	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80.0	nilai	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (persen)	80	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks pengelolaan kepegawaian (indeks)	4	indeks	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Pengawasan kearsipan (nilai)	75	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok (nilai)	80	Prosentase	0	0	0.00%	0.00%

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 :

#### Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBL Lombok

##### 1. Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP BPBL Lombok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Nilai PNBP BPBL Lombok berasal dari pendapatan yang dihitung dari penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain.

##### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan II tidak ada permasalahan dalam pemenuhan indikator kinerja ini, namun BPBL Lombok terus berupaya meningkatkan capaian PNBP untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III ini adalah melakukan peningkatan PNBP dari beberapa potensi sumber PNBP seperti perencanaan yang telah disusun pada Triwulan II.

##### Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.6908/DJPB.1/KU.340X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan III Tahun 2024, diketahui bahwa capaian PNBP BPBL Lombok pada Triwulan III Tahun 2024 ini adalah Rp. 1.046.684.993 atau 184,54% dari target PNBP Triwulan III sebesar Rp. 567.185.000

### Perbandingan dari waktu ke waktu

Capaian PNBP BPBL Lombok pada Triwulan III Tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 100,47% dari capaian PNBP Triwulan III Tahun 2023, adapun tampilan secara singkat atas capaian PNBP adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai PNBP BPBL Lombok

Nama SK :Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Nama Indikator : Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Triwulan III Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2024 thd Triwulan III Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2023			
567,185,000	1,046,684,993	184.54%	522,106,939	100.47	781,085,000	134.00%

Berikut disampaikan juga grafik perkembangan nilai perolehan PNBP sejak tahun 2019 :

Tabel 3. Grafik Nilai PNBP BPBL Lombok

Realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
492,631,807	670,682,464	840,850,396	762,404,658	690,190,937	781,085,000	1,046,684,993	134%

### Perbandingan antar sub unit kerja

Berikut adalah gambar realisasi PNBP BPBL Lombok dibandingkan dengan Unit pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

Tabel 4. Perbandingan realisasi PNBPN antar UPT

No.	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D CAPAIAN IKU	% SESUAI PK	S / D BULAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>REALISASI PENDAPATAN PNBPN</b>						
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Pusat)	Rp 50.000.000	Rp 2.782.887.713	5565,78	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 50.000.000	Rp 369.024.999	738,05	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.413.862.714		
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp 27.358.090.000	Rp 10.097.755.411	36,91	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 27.358.090.000	Rp 366.655.484	36,55	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 9.633.081.897		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 98.018.030		
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp 4.500.400.000	Rp 3.798.777.567	84,41	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 4.500.400.000	Rp 68.258.575	84,24	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 3.723.085.358		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 7.433.634		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp 1.590.081.000	Rp 2.000.540.749	125,81	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.590.081.000	Rp 1.990.929.419	125,21	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 9.611.330		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp 1.189.308.000	Rp 993.908.127	83,57	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.189.308.000	Rp 956.879.077	80,46	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 37.029.050		
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp 3.552.374.000	Rp 17.571.082.317	494,63	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 3.552.374.000	Rp 593.048.650	493,98	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp -	Rp 16.955.142.806		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 22.870.861		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp 1.555.000.000	Rp 1.593.054.593	102,45	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.555.000.000	Rp 1.523.476.000	97,97	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 69.578.593		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp 1.683.158.000	Rp 1.944.862.503	115,55	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.683.158.000	Rp 1.894.032.906	112,53	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 50.829.597		

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp 1.232.517.000	Rp 1.346.044.780	109,21	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.232.517.000	Rp 1.281.545.542	103,98	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 64.499.238		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp 1.274.795.000	Rp 1.035.924.577	81,26	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.274.795.000	Rp 970.525.558	76,13	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 65.399.019		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp 1.214.288.000	Rp 1.258.546.244	103,64	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.214.288.000	Rp 1.209.550.881	99,61	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 48.995.363		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu	Rp 1.212.600.000	Rp 758.127.543	62,52	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.212.600.000	Rp 755.412.716	62,30	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.714.827		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp 968.400.000	Rp 533.940.756	55,14	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 968.400.000	Rp 521.652.522	53,87	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 12.288.234		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp 781.085.000	Rp 1.046.684.993	134,00	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 781.085.000	Rp 879.289.743	112,57	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 167.395.250		
15	567800	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp 1.100.000.000	Rp 788.880.358	71,72	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.100.000.000	Rp 784.420.070	71,31	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 4.460.288		
16	445394	Balai Produksi Induk Unggul dan Kekekangan Karangasem	Rp 723.400.000	Rp 744.976.818	102,98	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 723.400.000	Rp 744.473.348	102,91	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 503.470		
		<b>JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)</b>	<b>Rp 49.985.496.000</b>	<b>Rp14.909.175.490</b>	<b>90,47</b>	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN BLU (II)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp30.311.310.061</b>		
		<b>JUMLAH NON ANGGARAN (III)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3.075.489.498</b>		
		<b>JUMLAH PENDAPATAN I + II + III</b>	<b>Rp 49.985.496.000</b>	<b>Rp48.295.975.049</b>	<b>96,62</b>	CAPAIAN IKU

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN

## Alokasi Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini tidak ada permasalahan, Meskipun demikian, BPBL Lombok ke depannya tetap akan meningkatkan nilai PNBPN untuk memenuhi target yang telah ditentukan.

## **Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 :**

### **Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan**

#### **2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke masyarakat**

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 442 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Calon Induk Ikan Tahun Anggaran 2024 , BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan calon induk kepada masyarakat. Spesifikasi bantuan calon induk yang diberikan yaitu :

- a. Apabila bantuan yang diberikan adalah Nila, maka minimal berat ikan yang harus disalurkan adalah 50 gram/ekor;
- b. Apabila bantuan yang diberikan adalah Kakap Putih, maka minimal berat ikan yang harus disalurkan adalah 300 gram/ekor;
- c. Apabila bantuan yang diberikan adalah Bawal Bintang, maka minimal berat ikan yang harus disalurkan adalah 300 gram/ekor.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan sebelumnya adalah meskipun sudah ada calon penerima bantuan yang telah memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagai penerima bantuan, namun penerima bantuan tersebut juga mengajukan kebutuhan bantuan benih, untuk mendukung operasional produksi.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan ini adalah koordinasi dengan tim bantuan benih dan Dinas Provinsi terkait dengan kebutuhan benih ikan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan tersebut.

**Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III ini belum ada kegiatan bantuan calon induk yang dilaksanakan karena masih dalam tahap memproduksi benih yang mencari calon penerima bantuan calon induk yang memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi dan teknis.

**Perbandingan dari waktu ke waktu**

Bantuan Calon Induk pada Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena pada Triwulan III belum ada capaian bantuan, berikut adalah Tabel persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat :

Tabel 5. Bantuan calon induk yang disalurkan

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama Indikator : Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan						
Triwulan III Tahun 2024			Realisasi Triwulan III Tahun 2023	Perbandingan Tahun 2024 thd Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	0,00%	0	0	75	0.00%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok pernah melakukan penyaluran bantuan calon induk yaitu pada Tahun 2021 dan 2023. Berikut adalah grafik perkembangan penyaluran bantuan Calon Induk sejak tahun 2019 :

Tabel 6. Perkembangan penyaluran bantuan Calon Induk

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	1,110	-	171.25%	75	-	0.00%

### Perbandingan antar sub unit kerja

Bantuan calon induk BPBL Lombok capaiannya sama dengan BBPBL Lampung dan lebih rendah jika dibandingkan dengan BPBL Ambon dan BPBL Batam karena BPBL Lombok belum ada capaian bantuan calon induk pada Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 7. Perbandingan antar sub unit kerja

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	75	0	0.00
BPBL Ambon	75	150	200.00
BPBL Batam	100	100	100.00
BBPBL Lampung	75	0	0.00

### Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.638.000 dan pada Triwulan III ini sudah direalisasikan sebesar Rp. 3.170.840 untuk pemeliharaan bak pembesaran calon induk

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan III Tahun 2024 adalah dikarenakan selain membutuhkan bantuan calon induk calon penerima bantuan juga membutuhkan bantuan benih, unit produksi di BPBL Lombok masih berupaya memenuhi target PNBPN terlebih dahulu sehingga ditargetkan pemenuhan usulan tersebut akan direalisasikan di triwulan berikutnya.

Tindak lanjut ke depannya dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah koordinasi dengan tim produksi dan bantuan benih untuk merealisasikan usulan kebutuhan bantuan calon dan benih

### 3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang disalurkan ke masyarakat

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan benih ikan laut kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm
- b. Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm
- c. Abalone ukuran minimal 2 cm
- d. Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm
- e. Tiram mutiara ukuran minimal 1 cm

#### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu kegiatan penyaluran bantuan benih yang terkendala pada bulan Mei dan Juni yang disebabkan oleh kultur massal plankton pakan alami yang mengalami *drop* atau gagal kultur sehingga berakibat pada terhentinya siklus produksi, sebab kebutuhan akan pakan alami pada fase pemeliharaan larva tidak dapat terpenuhi.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah telah dilaksanakan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait bantuan di wilayah kerja BPBL Lombok supaya tercukupi kebutuhan bantuan benih pada jalur aspirasi tersebut.

**Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

IKU ini merupakan IKU Semesteran sehingga pada Triwulan III ini belum dilakukan pengukuran, namun meskipun demikian bantuan benih sudah terealisasi sebanyak 212.800 ekor atau 61.96 % dari target sebanyak 343.435 ekor yang didistribusikan ke wilayah Kupang, Bima, Lombok Barat, Sumbawa dan Lombok Timur. Berikut adalah tabel capaian dan dokumentasi bantuan benih ikan :

Tabel 8. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat

No	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST	SK Penerima
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>212,800</b>		
<b>REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2024</b>									
<b>Bulan Januari - 2024</b>									
1	Nus Absalom Adu	POKDAKAN Ita Esa	NTT	Kupang	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.136/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
2	Karel Ferdinan Balle	POKDAKAN KUB Imanuel	NTT	Kupang	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.137/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
3	Joni Rassa	POKDAKAN KUB Kapala Batu	NTT	Kupang	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.138/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
4	Amadin Al Gazzali Karudin	POKDAKAN 96 Fish	NTT	Kupang	16 Januari 2024	Kakap Putih	4,000	No. B.139/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
5	Asri	POKDAKAN So Ati	NTB	Bima	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.171/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
6	Herimansyah	POKDAKAN So Nau Hill	NTB	Bima	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.172/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
7	Adhar	POKDAKAN KJA Bonto	NTB	Bima	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.173/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
8	Nurdin	KUB Usaha Bersama	NTB	Bima	18 Januari 2024	Kakap Putih	8,000	No. B.174/BPBL-L/PB.140/I/2024	No. B.116/BPBL-L/PB.150/BB/I/2024
<b>Bulan Februari - 2024</b>									
NIHIL									
<b>Bulan Maret - 2024</b>									
1	Lalu Sukri	POKDAKAN Beriuk Ures	NTB	Lombok Barat	26 Maret 2024	Kakap Putih	12,500	No. B.852/BPBL-L/PB.140/III/2024	No. B.753/BPBL-L/PB.140/III/2024
2	Herwin Aminudin	POKDAKAN Bangun Bersama	NTB	Lombok Barat	26 Maret 2024	Kakap Putih	12,500	No. B.853/BPBL-L/PB.140/III/2024	No. B.753/BPBL-L/PB.140/III/2024
<b>Bulan April - 2024</b>									
1	Sapowan	POKDAKAN Gunung Ketapang Jaya	NTB	Lombok Barat	22 April 2024	Kakap Putih	20,000	No. B.1113/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
2	Agus Alwi	POKDAKAN Bagek Kembar	NTB	Lombok Barat	22 April 2024	Kakap Putih	20,000	No. B.1114/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
3	Hanan	POKDAKAN Kaung Malasso	NTB	Sumbawa	25 April 2024	Tiram Mutiara	10,000	No. B.1148/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
4	Abdul Hasan	POKDAKAN Mutiara Pagi	NTB	Sumbawa	25 April 2024	Tiram Mutiara	10,000	No. B.1149/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
5	Nini Triana	POKDAKAN Tani Nelayan Harapan Baru	NTB	Sumbawa	25 April 2024	Tiram Mutiara	10,000	No. B.1150/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
6	Sumardi	POKDAKAN Lembaran Baru	NTB	Sumbawa	25 April 2024	Tiram Mutiara	10,000	No. B.1151/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
7	Hasanuddin	POKDAKAN Berkah Ilahi	NTB	Sumbawa	25 April 2024	Tiram Mutiara	10,000	No. B.1152/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
8	Multazam Marjak, S.IP	Yayasan "Darul Yatama Walmasakin"	NTB	Lombok Timur	25 April 2024	Kakap Putih	30,000	No. B.1153/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
9	Zulfikar Ali Akbar	POKDAKAN Pantai Bersinar	NTB	Lombok Timur	30 April 2024	Kakap Putih	19,800	No. B.1178/BPBL-L/PB.140/IV/2024	No. B.1104/BPBL-L/PB.140/IV/2024
<b>Bulan Mei - 2024</b>									
NIHIL									
<b>Bulan Juni - 2024</b>									
NIHIL									



Gambar 5. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat

**Perbandingan dari waktu ke waktu**

Bantuan Benih baru akan dilakukan perhitungan pada semester II atau akhir tahun, namun secara singkat digambarkan Bantuan Benih pada Triwulan III Tahun 2024 memiliki prosentase yang sama dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023, berikut adalah Tabel persentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat :

Tabel 9. Prosentase bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama Indikator : Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan						
Triwulan III Tahun 2024			Realisasi Triwulan III Tahun 2023	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2024 thd Triwulan III Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap target Tahunan 2024
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	0.00%	0.00%	0.00%	343,435	%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok telah rutin melakukan penyaluran bantuan benih ke beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah tabel perkembangan penyaluran bantuan benih sejak tahun 2019 :

**Tabel 10. Perkembangan penyaluran bantuan benih**

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
771,000	866,264	832,850	815,500	116.08%	75	-	0.00%

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

Bantuan benih BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah daripada BPBL Ambon dan Batam namun sama dengan BBPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut :

**Tabel 11. perbandingan antar sub unit kerja UPT Laut**

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	75	0	82.61
BPBL Ambon	75	98.12	130.83
BPBL Batam	100	96.1	96.10
BBPBL Lampung	75	0	0.00

### **Alokasi Anggaran**

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.929.668.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp 1.614.218.149 atau 83,65% dari pagu untuk kegiatan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu menurunnya produktivitas induk bawal bintang dan kakap putih dikarenakan adanya kematian pada induk sehingga

menurunkan performa produktifitas benih yang dihasilkan, tingginya permintaan akan benih baik untuk penjualan maupun bantuan benih membuat divisi produksi harus membagi fokus pemenuhan permintaan.

Tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan divisi produksi untuk mengalihkan fokus pemenuhan ke program bantuan benih.

#### 4. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi

Produksi calon induk unggul adalah kegiatan produksi calon induk unggul dari BPBL Lombok untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias, bawal bintang dan kakap putih.

##### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu belum tercapainya ukuran dan berat ikan yang memenuhi standar calon induk unggul.

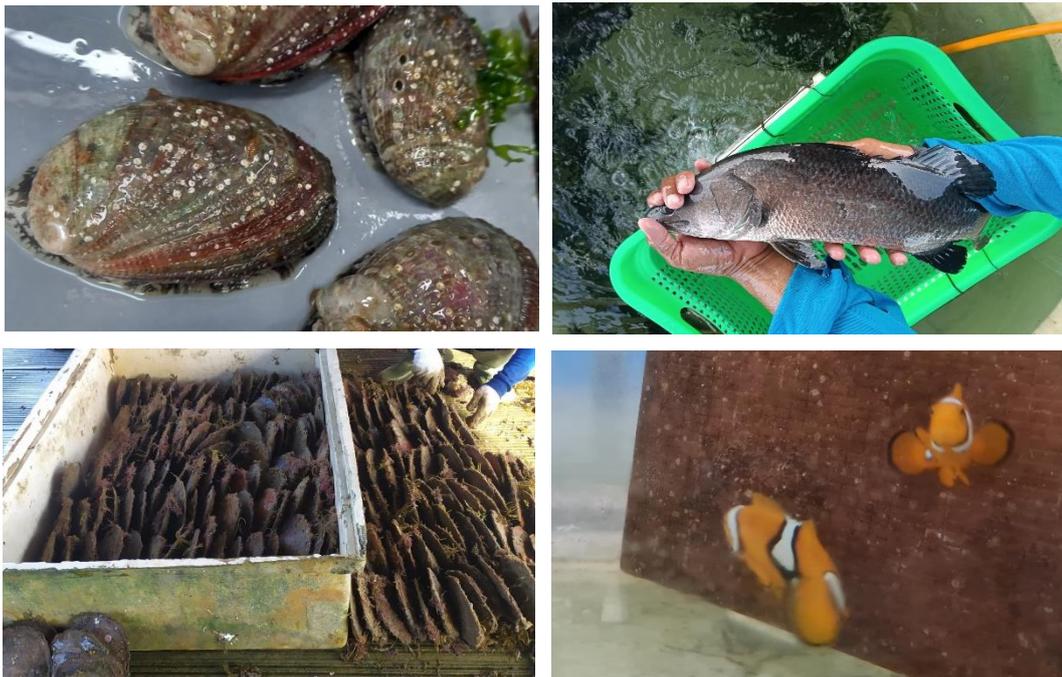
Perbaikan yang sudah dilakukan adalah melakukan optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul yang diproduksi.

##### Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 2.196 ekor yang terdiri dari 320 ekor calon induk abalone, 345 ekor calon induk tiram Mutiara, 836 ekor calon induk clown fish dan 100 ekor calon induk cardinal banggai . Berikut adalah rekapitulasi produksi calon induk unggul :

Tabel 12. Realisasi Produksi Calon Induk Unggul

Komoditas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL TARGET
Abalone				100			100	220					420
Ikan Hias							526		410				936
Tiram Mutiara						495			345				840
Bawal Bintang													-
Kakap Putih													-
<b>TOTAL REALISASI PRODUKSI CALON INDUK UNGGUL</b>													<b>2,196</b>



Gambar 6. Dokumentasi calon induk yang di produksi

### Perbandingan dari waktu ke waktu

Produksi calon induk unggul pada Trwulan III Tahun 2024 naik sebesar 161.12% dibandingkan dengan produksi calon induk unggul Triwulan III Tahun 2023, berikut adalah Tabel capaian produksi calon induk unggul :

Tabel 13. Capaian produksi calon induk unggul

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
Nama Indikator : Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi							
Triwulan III Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target 2024	Realisasi Terhadap	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2023	Triwulan III Tahun 2024		Target	Tahunan (%)
770	2196	0.00%	841.00	161.12	3476	63.18%	

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok telah rutin melakukan kegiatan produksi calon induk unggul. Berikut adalah perkembangan produksi calon induk unggul sejak tahun 2019 :

Tabel 14. Perkembangan Calon Induk Unggul yang diproduksi

Realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	%capaian
3,850	3,780	2,750	2,226	127.21%	3476	2196	63%

### Perbandingan antar sub unit kerja

Calon Induk Unggul ikan laut yang diproduksi BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan BPBL Ambon dan BPBL Batam, namun lebih tinggi dibandingkan BPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 15. perbandingan capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi antar sub unit kerja UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	3476	2196	63.18
BPBL Ambon	4090	3791	92.69
BPBL Batam	100	109.4	109.40
BBPBL Lampung	4305	0	0.00

### Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 929.130.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp 793.508.490 atau 85.40% dari pagu untuk kegiatan Operasional produksi dan pemeliharaan.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini terdapat permasalahan yaitu hanya tiram Mutiara, abalone dan ikan hias yang telah mencapai ukuran dan berat ikan yang memenuhi standar calon induk unggul, sedangkan komoditas lainnya seperti bawal bintang dan kakap putih belum memenuhi standar ukuran dan berat calon induk dikarenakan kurangnya suplay pakan buatan hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang digunakan untuk pembelian pakan bersumber dari PNBP

Sehingga tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah optimalisasi penggunaan sumber anggaran PNBP untuk belanja operasional produksi calon induk

## **5. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat**

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 380 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah berupa Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2024, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan bibit rumput laut kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Strain :
  - *Kappaphycus alvarezzi / Eucheuma cottonii*
  - *Kappaphycus Striatum/Sakul*
  - *Eucheuma Spinosum*
  - *Gracilaria Sp* dan/atau

- Jenis lainnya sesuai dengan karakteristik perairan.
- Bibit hasil kultur jaringan atau bibit lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan asal atau hasil verifikasi oleh UPT DJPB atau dinas prov/kab/kota;
- Thalus : Bercabang banyak, bersih, tidak berlendir, tidak patah, sehat dan tidak ditempeli lumut dan organisme lainnya.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah masih berjalannya proses penanaman bibit rumput laut sehingga belum ada realisasi bantuan bibit rumput laut.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah optimalisasi produksi bibit rumput untuk bantuan ke masyarakat.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Bantuan Bibit Rumput Laut baru akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun, namun pada Triwulan ini telah disalurkan bantuan sebanyak 2.500 Kg atau 50% dari target (5.000 Kg), berikut adalah tabel penyaluran bantuan bibit Rumput Laut dan dokumentasi penyerahan bantuan Bibit Rumput Laut :

**Tabel 16. Capaian bantuan bibit Rumput Laut**

Bulan	Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut	Jumlah Kumulatif Bantuan Bibit Rumput Laut	Prosentase capaian bantuan bibit Rumput Laut
Januari	-	-	0,00%
Februari	1,000	1,000	20,00%
Maret		1,000	20,00%
April		1,000	20,00%
Mei		1,000	20,00%

Juni		1,000	20,00%
Juli		1,000	20,00%
Agustus	1,000	2,000	40,00%
September	500	2,500	50,00%



Gambar 7. Penyerahan Bantuan bibit rumput laut

### Perbandingan dari waktu ke waktu

Bantuan Bibit Rumput Laut pada Triwulan III Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena pada Tahun 2023 tidak ada bantuan bibit Rumput Laut.

Dari Tahun 2019, sebanyak 2 kali BPBL Lombok telah melakukan penyaluran bantuan bibit Rumput Laut ke beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah tabel perkembangan penyaluran bantuan Bibit Rumput Laut sejak tahun 2019:

Tabel 17. Perkembangan penyaluran bantuan bibit Rumput Laut

Realisasi	2024
-----------	------

2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
	40,000	6,250	-	-	75	-	-

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

Bantuan Bibit Rumput Laut BPBL Lombok capaiannya sama dengan BPBL Lampung dan BPBL Batam namun lebih rendah dari BPBL Ambon yang sudah mencapai 133,33%. Berikut adalah tabel perbandingannya :

**Tabel 18. Perbandingan antar UPT Laut DJPB**

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	75	-	-
BPBL Ambon	75	100	133.33
BPBL Batam	-	-	-
BBPBL Lampung	75	0	0.00

### **Alokasi Anggaran**

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 190.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 155.075.182 atau 81.62% dari pagu untuk biaya kegiatan pelaksanaan dan distribusi .

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan musim tanam di lokasi budidaya bibit rumput laut milik Balai dengan lokasi calon penerima sehingga saat bibit sudah siap didistribusikan kelompok belum siap untuk menerima karena jika hal ini dipaksakan akan menyebabkan kegagalan dalam usaha budidaya.

Tindak lanjut Pada Triwulan selanjutnya adalah optimalisasi metode serta lingkungan yang sesuai untuk budidaya rumput laut.

## **6. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat**

Kebun Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 377 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2024 merupakan bantuan pemerintah berupa barang yaitu sarana dan prasarana KBRL dengan metode :

- 1) Longline;
- 2) Rakit apung; dan
- 3) Lepas dasar.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah masih belum tersalurkannya bantuan KBRL sebanyak 3 paket.

Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah menyelesaikan proses administrasi untuk kelompok yang belum menerima bantuan KBRL.

### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

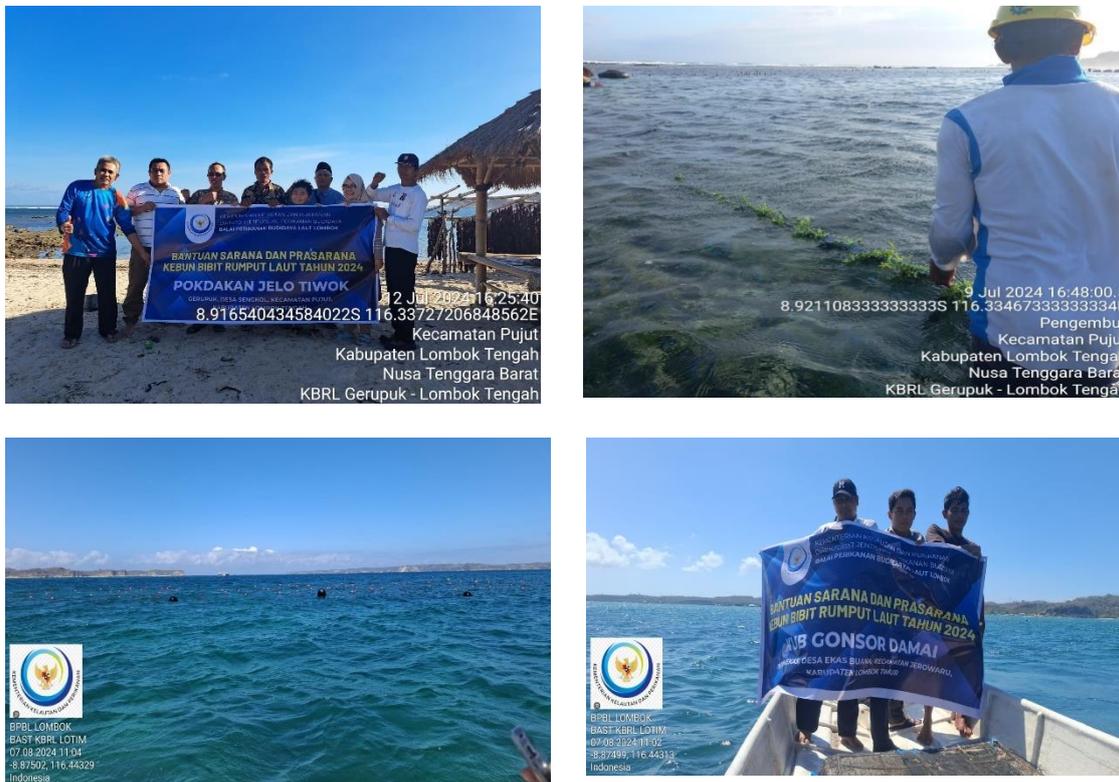
IKU ini merupakan IKU yang pengukurannya dihitung secara semesteran, Pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 14 paket atau 100% dari target dimana telah disalurkan ke wilayah Bima, Sumbawa, Dompu, Buleleng, Klungkung dan Lombok Timur. berikut adalah Rekapitulasi bantuan dan dokumentasi kegiatan KBRL :

Tabel 19. Rekapitulasi Bantuan KBRL

No	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kot a	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Kebun Bibit Rumput Laut (Paket)	Keterangan BAST	SK Penerima
JUMLAH TOTAL							14		
REALISASI BANTUAN Kebun Bibit Rumput Laut BPBL LOMBOK TAHUN 2024									
Januari - 2024									
NIHIL									
Februari 2024									
NIHIL									
Maret - 2024									
NIHIL									
April 2024									
1	Sahaluddin	Bahari Indah	NTB	Sumbawa	4 April 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1021/BPBL - L/PB.150/KB RL/IV/2024 tanggal 4 April 2024	Nomor : B.538/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 23 februari 2024
2	Hasanudin	Jaya Makmur	NTB	Sumbawa	4 April 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1020/BPBL - L/PB.150/KB RL/IV/2024 tanggal 4 April 2024	Nomor : B.538/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 23 februari 2024
3	Mahmud	Oi Ncara	NTB	Bima	3 April 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1010/BPBL - L/PB.150/KB RL/IV/2024 tanggal 3 April 2024	Nomor : B.539/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 23 februari 2024

4	Rita Komalasari	Srikandi	NTB	Bima	3 April 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1011/BPBL - L/PB.150/KB RL/IV/2024 tanggal 3 April 2024	Nomor : B.539/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 23 februari 2024
<b>Mei 2024</b>									
5	Abdul Hamid Rasyid	KUB Bina Karya	Bali	Buleleng	16 Mei 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1311/BPBL - L/PB.150/KB RL/V/2024 tanggal 16 Mei 2024	Nomor : B.597/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 29 Februari 2024
6	Bakri	KUB Bunga Indah	Bali	Buleleng	16 Mei 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1310/BPBL - L/PB.150/KB RL/V/2024 tanggal 16 Mei 2024	Nomor : B.597/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 29 Februari 2024
7	I Nyoman Sudastra	Sari Segara	Bali	Klungkung	16 Mei 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1312/BPBL - L/PB.150/KB RL/V/2024 tanggal 16 Mei 2024	Nomor : B.597/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 29 Februari 2024
8	I Ketut Pait Antara	Segara Mandiri	Bali	Klungkung	16 Mei 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1309/BPBL - L/PB.150/KB RL/V/2024 tanggal 16 Mei 2024	Nomor : B.597/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 29 Februari 2024
9	M. Akbar	Kramat	NTB	Dompu	3 Mei 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1215/BPBL - L/PB.150/KB RL/V/2024 tanggal 3 Mei 2024	Nomor : B.540/BPBL - L/PB.150/II /2024 tanggal 23

									februari 2024
10	M. Arif Fathurrahman	Mutiara Teluk Saleh	NTB	Dompu	3 Mei 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1216/BPBL - L/PB.150/KB RL/V/2024 tanggal 3 Mei 2024	Nomor : B.540/BPBL - L/PB.150/II/2024 tanggal 23 februari 2024
Juni 2024									
11	Matra	Gili Pokak	NTB	Lombok Timur	20 Juni 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1597/BPBL - L/PB.150/KB RL/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024	B.1169/BPBL - L/PB.150/I/V/2024 tanggal 29 April 2024
Juli 2024									
12	Sayup	Jelo Tiwok	NTB	Lombok Tengah	22 Juli 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.1862/BPBL - L/PB.150/KB RL/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024	B.1550/BPBL - L/PB.150/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024
Agustus 2024									
13	Doni Iskandar	KUB Gonsor Damai	NTB	Lombok Timur	14 Agustus 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.2096/BPBL - L/PB.150/KB RL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024	B.1583/BPBL - L/PB.150/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024
14	Mahsar	Harapan Bersatu	NTB	Lombok Timur	14 Agustus 2024	Cottoni sakul	1	NO BAST : B.2097/BPBL - L/PB.150/KB RL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024	B.1583/BPBL - L/PB.150/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024



Gambar 8. Bantuan KBRL

**Perbandingan dari waktu ke waktu**

Capaian bantuan sarana KBRL pada Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian bantuan sarana KBRL Triwulan Tahun 2023 karena pengukuran pada Triwulan III Tahun 2024 dilakukan secara semsesteran (akhir tahun) .

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok telah beberapa kali telah melakukan penyaluran bantuan KBRL ke beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah tabel perkembangan penyaluran bantuan KBRL sejak tahun 2019:

Tabel 20. Perkembangan penyaluran bantuan KBRL

Realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	%capaian
20	-	10	20	100	75	-	-

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

Bantuan sarana KBRL BPBL Lombok capaiannya sama dengan BBPBL Lampung namun lebih rendah dari BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

**Tabel 21. Perbandingan antar UPT Laut DJPB**

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	75	-	-
BPBL Ambon	75	86.84	115.79
BPBL Batam	75	100	133.33
BBPBL Lampung	75	0	0.00

#### **Alokasi Anggaran**

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 770.000.000 dimana pada Triwulan ini telah terealisasi sebesar Rp 734.915.338 atau 95,44% dari pagu dimana digunakan untuk kegiatan belanja barang serta survey dan identifikasi.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti namun BPBL Lombok sebagai instansi pemberi bantuan KBRL sebagaimana telah diatur sesuai Juknis Penyaluran Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut tetap melakukan kegiatan monev terhadap bantuan yang sudah diberikan

Tindak lanjut Pada Triwulan berikutnya adalah menyelesaikan proses monev terhadap bantuan KBRL yang sudah disalurkan.

## 7. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan

Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan merupakan sarana dan prasarana bioflok dimana berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 386 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budi Daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok Tahun Anggaran 2024, BPBL Lombok sebagai Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab menyalurkan bantuan bioflok sebanyak 54 paket dengan kriteria sebagai berikut :

- a. benih ikan ;
- b. pakan ikan *starter 1*;
- c. pakan ikan *starter 2*;
- d. Pakan ikan *Grower* dan *finisher*;
- e. obat ikan dan vitamin;
- f. prasarana dan sarana operasional;
- g. peralatan perikanan;

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu masih belum terealisasinya sebanyak 36 paket bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok).

Permasalahan ini sudah ditindaklanjuti dengan menyelesaikan proses administrasi untuk kelompok yang belum menerima bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok).

**Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Capaian IKU ini dihitung pada akhir tahun namun pada Triwulan III ini bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar telah disalurkan sebanyak 36 paket atau 66,66% dari target 54 paket. Berikut adalah rekapitulasi bantuan dan dokumentasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) :

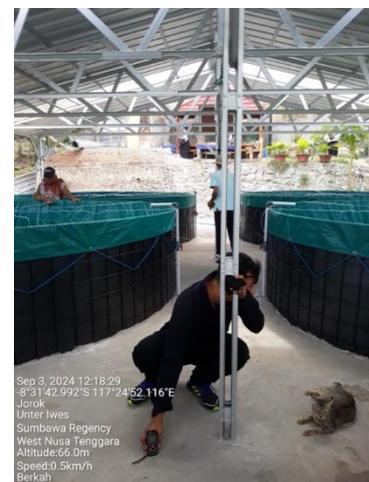
Tabel 23. Rekapitulasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar

No	Nama Kelompok	Provinsi	SK Penetapan	BAST	KET
1	Bina Karya	Jawa Barat	Nomor B.470/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 16 Februari 2024	NO BAST. B.1030/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 4 april 2024	Lele
2	MAJASI	Jawa Barat	Nomor B.470/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 16 Februari 2024	NO BAST. B.1031/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 4 april 2024	Nia
3	MINA BERKAH PLAWANGAN	Jawa Barat	Nomor B.470/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 16 Februari 2024	NO BAST. B.1032/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 4 april 2024	Lele
4	Ulam Ayu	Bali	Nomor B.537/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 23 Februari 2024	NO BAST. B.1163/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 25 april 2024	Lele
5	Mina Giri Asrama	Bali	Nomor B.537/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 23 Februari 2024	NO BAST. B.1164/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 25 april 2024	Lele
6	Mina Asri Mandiri	Bali	Nomor B.537/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 23 Februari 2024	NO BAST. B.1165/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 25 april 2024	Lele
7	Mina Taman Lestari	Bali	Nomor B.537/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 23 Februari 2024	NO BAST. B.1166/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 25 april 2024	Nila
8	Mina Pala Sari	Bali	Nomor B.537/BPBL-L/PB.340/II/2024 tanggal 23 Februari 2024	NO BAST. B.1167/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 25 april 2024	Lele
9	Buen Turang	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1543/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	Lele
10	Saling Junyung	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1542/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	Nila
11	Sekoto Permai	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1544/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	Lele

12	Insan Bakalako	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1553/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024	Nilai
13	Hampan Mata Air	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1551/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024	Lele
14	Kelabis Mandiri	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1552/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024	Lele
15	Sinar Selaparang	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1567/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024	Nilai
16	Ompu Wonca	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1568/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024	Nilai
17	Ponpes Al Amin Muhammadiyah	NTB	Nomor B.683/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 8 Maret 2024	NO BAST. B.1569/BPBL-L/PB.140/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024	Nilai
18	Mina Taman Lestari	Bali	Nomor B.863/BPBL-L/PB.340/III/2024 tanggal 27 Maret 2024	NO BAST. B.1168/BPBL-L/PB.130/IV/2024 tanggal 25 april 2024	Lele
19	Pemuji	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1979/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele
20	Lalian Mandiri	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1972/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele
21	Prima Mandiri	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1975/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele
22	Angkasa	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1971/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele
23	Vincent Bersaudara	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1973/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele

24	St. Petrus Lahurus	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1974/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Nila
25	Taleko Monit	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1976/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele
26	Akatsuki Manuat	NTT	B.1255/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024	B.1977/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele
27	Setetes Madu	NTT	B.1308/BPBL-L/PB.340/V/2024 tanggal 16 mei 2024	B.1978/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024	Lele
28	Aqua Farm Inovators	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2348/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 10 September 2024	Lele
29	Selaras Alam	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2349/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 10 September 2024	Nila
30	Marga Karya	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2342/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 9 September 2024	Lele
31	Saling Pedri	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2341/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 9 September 2024	Lele
32	Garo Sejahtera	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2340/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 9 September 2024	Nila
33	Adventorous Sumbawa	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2338/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 9 September 2024	Lele
34	Pemuda Mandar Sukses	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2325/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 6 September 2024	Nila

35	Batu Ble Makmur	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2326/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 6 September 2024	Nila
36	Berkah	NTB	B.1536/BPBL-L/PB.430/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024	B.2339/BPBL-L/PB.140/BIOFLOK/IX/2024 tanggal 9 September 2024	Lele



Gambar 8. Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok)

## Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu belum dilakukan perhitungan Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok) yang disalurkan ke masyarakat.

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

Capaian IKU Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar di BPBL Lombok sama dengan BPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam yaitu belum ada capaian pada Triwulan III Tahun 2024.

### **Alokasi Anggaran**

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.170.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp. 7.327.946.365 atau 66,07% dari pagu yang digunakan untuk belanja barang, Identifikasi, verifikasi dan monev kegiatan di wilayah Bali NTB, dan NTT.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu masih belum terealisasinya sebanyak 16 paket bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar (bioflok).

Tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah memastikan bahwa proses sarpras yg belum terealisasi dapat segera terealisasikan.

## 8. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu.

Pada Tahun 2024 ini BPBL Lombok ditargetkan melaksanakan diseminasi teknologi sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah NTB dan NTT.

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Pada Triwulan sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi karena kegiatan telah selesai dilaksanakan.

### Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

Capaian IKU ini dihitung pada akhir tahun namun diseminasi teknologi telah selesai dilaksanakan karena adanya percepatan kegiatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan diseminasi teknologi tersebut :

No	LOKASI DISEMINASI TEKNOLOGI	DOKUMENTASI
1.	Kab.Sikka, Nusa Tenggara Timur	

2.	Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	
3.	Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	

Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi

### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 dimana capaian baru akan dihitung pada akhir tahun.

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

Diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di BPBL Lombok sama dengan BBPBL Lampung namun lebih rendah dari BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 22 Perbandingan prosentase Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100	0	0.00
BPBL Ambon	100	110	110.00
BPBL Batam	100	130	130.00
BBPBL Lampung	100	0	0.00

### Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.0000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp. 286.203.278 atau 95,40% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan diseminasi teknologi.

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan III Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi karena kegiatan telah selesai dilaksanakan.

## 9. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 387 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Hias TA 2024, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan Sarana dan Prasarana ikan hias kepada kelompok pembudidaya ikan, yaitu :

- a. Induk
- b. Pakan
- c. Wadah budi daya;
- d. Peralatan dan papan nama;

- e. Obat ikan dan vitamin
- f. Sarana Budi Daya.

**Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan II Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi karena kegiatan telah selesai dilaksanakan.

**Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Capaian IKU ini dihitung pada akhir tahun namun kegiatan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias telah selesai dilaksanakan karena adanya percepatan kegiatan. Berikut adalah tabel rekapitulasi bantuan dan dokumentasi kegiatan Bantuan sarana dan prasarana ikan hias :

Tabel 23. Realisasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias

No	Jenis Bantuan	Nama Kelompok	Provinsi	Komoditas	Jumlah Bantuan	Nomor BAST	SK Penetapan Penerima
1	BANSARPRAS Ikan Hias	POKDAKAN Telaga Koi	NTB	Ikan Koi	1 Paket	B.1014/BPBL-L/KP.440/IV/2024	B.509/BPBL-L/PB.120/II/2024
2	BANSARPRAS Ikan Hias	POKDAKAN Al-Amin	NTB	Ikan Koi	1 Paket	B.1015/BPBL-L/KP.440/IV/2024	B.509/BPBL-L/PB.120/II/2024





Gambar 10. Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Ikan Hias

### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu belum dilakukan perhitungan Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat.

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat hanya ada di BPBL Lombok sehingga tidak bisa dibandingkan dengan UPT Laut lainnya.

### **Alokasi Anggaran**

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 90.871.400 atau 90,87% dari pagu yang digunakan untuk belanja barang serta kegiatan survey dan identifikasi.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi karena kegiatan telah selesai dilaksanakan.

### **Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 :**

## **Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan**

### **10. Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan**

Kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji adalah suatu kegiatan pelayanan pengujian sampel oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok yang terdiri dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi (non AMR), dan biologi molekuler.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan II Tahun 2024 ini terdapat permasalahan yaitu adanya kerusakan mesin UPS yang merupakan alat yang berfungsi menstabilkan tegangan dan menjaga alat PCR tetap hidup jika terjadi listrik padam.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan PLN untuk pergantian kabel untuk menjaga tegangan stabil dan perbaikan mesin UPS.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pada Triwulan III Tahun 2024 ini BPBL Lombok telah menguji sebanyak 2784 sampel atau 288,50 % dari target sampel (965 sampel). Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 24. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Bulan	Target	Ruang Lingkup Uji					Jumlah	Kumulatif	Prosentase
		Kualitas Air	Molekuler	Mikrobiologi	Parasit dan Patologi	Residu			
Januari	77	230	5	1	2	238	238	24,66	
Februari	79	457	39	5	5	506	744	77,10	
Maret	59	317	8	17	4	346	1090	112,95	
April	74	124	10	10	8	152	1242	128,70	
Mei	81	222	36	10	16	284	1526	158,13	
Juni	86	251	13	52	7	323	1849	191,61	
Juli	85	426	8	7	11	452	2301	238,45	
Agustus	85	165	45	17	26	253	2554	264,66	
September	88	193	32	2	3	230	2784	288,50	
Oktober	86					0			
November	85					0			
Desember	80					0			
<b>TOTAL</b>	<b>965</b>	<b>2385</b>	<b>196</b>	<b>121</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>2784</b>	<b>288,50</b>	



Gambar 11. Dokumentasi pengambilan sampel

### Perbandingan dari waktu ke waktu

Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan pada Triwulan III Tahun 2024 lebih tinggi 78.36% dari Triwulan III Tahun 2023. Berikut adalah Tabel Layanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan :

Tabel 25. Prosentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan						
Nama Indikator : Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan						
Triwulan III Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan	Target 2024	Realisasi Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2023	Realisasi Triwulan III Tahun 2024 thd Triwulan III Tahun		
60	288.50	480.83%	161.75	78.36	100	288.50%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok rutin melakukan pengujian sampel. Berikut adalah perkembangan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan sejak tahun 2019 :

Tabel 26. Perkembangan pengujian Sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
1202	2164	3567	4162	206.9	100	288,50%	288,50%

### Perbandingan antar sub unit kerja

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih tinggi dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 29. Perbandingan Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100	288.50	288.50
BPBL Ambon	100	219,10	219,10
BPBL Batam	100	114,58	114,58
BBPBL Lampung	100	139,10	139,10

### Alokasi Anggaran

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 355.214.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp 334.290.732 atau 94,11% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan sampel kualitas air, sampel patologi, dan sampel mikrobiologi.

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan III Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi karena target telah tercapai.

## 11. Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (parameter)

Akreditasi Laboratorium ISO 17025 adalah standar terpenting untuk laboratorium pengujian dan / atau kalibrasi. Dengan adanya menegaskan bahwa laboratorium Anda mampu menghasilkan hasil pengujian dan data kalibrasi yang tepat dan akurat. Akreditasi ISO 17025 bertindak sebagai proses tinjauan pihak ketiga dalam hal ini KAN yang memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu laboratorium mutakhir dan memiliki kompetensi teknis yang komprehensif. Standar ISO 17025 digunakan untuk memverifikasi kemampuan Laboratorium

dalam menghasilkan data pengujian dan kalibrasi yang andal, termasuk penanganan dan pengangkutan item pengujian yang tepat.

Laboratorium penguji kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok sudah terakreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan pada pelanggan dan juga Pelanggan merasa bahwa layanan tersebut dapat dipercaya karena diverifikasi oleh pihak ketiga. Selain itu, akreditasi memberikan jaminan bahwa organisasi atau laboratorium tertentu mematuhi standar kualitas yang disyaratkan secara internasional. Pada pada bulan Agustus tahun 2023 dilakukan survailance 1 dari KAN dan selanjutnya sesuai jadwal dari KAN pada bulan ke 36 akan dilakukan survailance ke 2. Direncanakan pada saat survailance ke 2 akan dilakukan penambahan ruang lingkup pengujian yaitu parameter EHP dengan metode RT.PCR, parameter kualitas air TSS dengan metode gravimetri dan Amoniak dengan metode spektrofotometer. Pada tahun 2024 dilakukan kegiatan maintenance akreditasi dan persiapan penambahan ruang lingkup diantaranya kalibrasi internal dan eksternal, uji banding, kaji ulang manajemen, audit internal, uji profisiensi dan kaji ulang dokumen.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan II Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi adalah belum dilaksanakan validasi metode pengujian MHD pada lobster. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan validasi metode pengujian MHD tersebut.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Capaian IKU ini akan dihitung pada akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi merupakan IKU yang baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

### Perbandingan antar sub unit kerja

IKU Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi belum ada capaiannya sama dengan BPBL Batam, BPBL Ambon, dan BBPBL Lampung.

### Alokasi Anggaran

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000 dimana pada Triwulan ini telah terealisasi sebesar Rp. 42.250.081 atau 56.33% dari pagu yang digunakan untuk pemeliharaan sana dan prasarana peralatan laboratorium yang terakreditasi.

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Pada Triwulan III Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi adalah belum memiliki metode uji yang tertelusur/standar untuk pengujian MHD.

Tindak lanjut pada TW berikutnya adalah melakukan pemesanan pada Badan Standarisasi Nasional terkait metode uji MHD.

## 12. **Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance**

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.

Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.

Pengujian resistansi antimikroba oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba, dimana semakin kecil tingkat resistansi mikroba, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan II Tahun 2024 ini terdapat permasalahan yaitu adanya kerusakan mesin UPS yang merupakan alat yang berfungsi menstabilkan tegangan dan menjaga alat PCR tetap hidup jika terjadi listrik padam.

Perbaikan yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan PLN untuk pergantian kabel untuk menjaga tegangan stabil dan perbaikan mesin UPS.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini BPBL telah menguji sebanyak 27 sampel atau 77.14 % dari target sampel (35 sampel). Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 30. Realisasi Jumlah sampel AMR

Bulan	Target	Ruang Lingkup Uji	Jumlah	Kumulatif	Prosentase
		AMR			
Januari	0	0	0	0	0
Februari	3	14	14	14	40
Maret	3	2	2	16	45,71
April	2	2	2	18	51,43
Mei	3	1	1	19	54,29
Juni	3	1	1	20	57,14
Juli	4	5	5	25	71,43
Agustus	4	2	2	27	77,14
September	4	0	0	27	77,14



Gambar 12. Dokumentasi pengambilan sampel AMR

**Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Persentase pengujian sampel antimikrobal resistance (AMR) turun sebesar 6,33 % jika dibandingkan dengan IKU capaian sampel tersebut pada Triwulan III Tahun 2023. adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 31. Persentase pengujian AMR**

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan						
Nama Indikator : Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)						
Triwulan III Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2024 thd Triwulan III Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2023			
70	77.14	110.20%	82.35	79.32	100	77.14%

Dari Tahun 2019, BPBL Lombok rutin melakukan pengujian AMR. Berikut adalah perkembangan pengujian AMR sejak tahun 2019 :

**Tabel 27. Perkembangan pengujian sampel AMR**

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	-	-	83	101.96	100	77.14	77.14%

**Perbandingan antar sub unit kerja**

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 28. Perbandingan Persentase pengujian sampel AMR

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase
BPBL Lombok	100	77.14	77.14
BPBL Ambon	100	137.14	137.14
BPBL Batam	100	145.76	145.76
BBPBL Lampung	100	104.65	104.65

### Alokasi Anggaran

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 31.075.000 dimana pada Triwulan III Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar Rp. 22.271.975 atau 71.67% dari pagu yang digunakan untuk Perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan.

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, realisasi sampel AMR hanya sebesar 77,14% atau masih kurang 8 sampel lagi untuk memenuhi target IKU persentase sampel AMR Tahun 2024.

Tindak lanjut untuk Triwulan berikutnya adalah mengupayakan target sampel AMR terpenuhi dengan cara melakukan monitoring lingkungan untuk pengambilan sampel.

## **13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)**

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS,
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

### Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya

Permasalahan pada Triwulan sebelumnya adalah belum tercapainya target tahunan IP ASN BPBL Lombok sebesar 85.

Tindak lanjut pada Triwulan ini adalah menginstruksikan kepada pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek/pelatihan untuk meningkatkan IP ASN BPBL Lombok

### Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan

IKU ini merupakan IKU semesteran dimana pengukurannya akan dilakukan pada semester II atau akhir tahun, namun berdasarkan website ropeg.kkp.go.id IP ASN BPBL Lombok saat ini adalah 85,26

IP ASN 2024														
	Dashboard	Eselon	Pegawai	FAQ	IP ASN 2023									
5	DIREKTORAT IRAN AIR PAYAU		35		21.94	87.76 %	26.35	65.88 %	25.14	83.8 %	5	100 %	78.44	SEDANG
6	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA		77		20.97	83.88 %	32.21	80.53 %	25	83.33 %	5	100 %	83.18	TINGGI
7	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG		71		20.55	82.2 %	32.62	81.55 %	25.85	86.17 %	5	100 %	84.01	TINGGI
8	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI		76		21.11	84.44 %	29.7	74.25 %	24.67	82.23 %	5	100 %	80.48	SEDANG
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO		75		20.93	83.72 %	32.7	81.75 %	25.4	84.67 %	5	100 %	84.04	TINGGI
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR		81		20.73	82.92 %	33.86	84.65 %	26.6	88.67 %	5	100 %	86.19	TINGGI
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JAMBI		61		20.85	83.4 %	40	100 %	25.16	83.87 %	5	100 %	91.02	SANGAT TINGGI
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN		53		20.43	81.72 %	39.46	98.65 %	25.85	86.17 %	5	100 %	90.75	TINGGI
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM		51		20.88	83.53 %	34.03	87.33 %	25.08	86.6 %	5	100 %	86.70	TINGGI
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK		50		20.74	82.96 %	34.52	86.3 %	25	83.33 %	5	100 %	85.26	TINGGI
15	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON		52		21	84 %	33.39	83.47 %	25.67	85.57 %	5	100 %	85.07	TINGGI

Gambar 12. Website Ropeg IP ASN 2024

### Perbandingan dari waktu ke waktu

IKU IP ASN pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu belum dilakukan perhitungan.

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan satker lainnya karena perhitungan pada Semester II 2024.

#### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan pada Triwulan ini, namun meskipun demikian BPBL Lombok tetap menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek/pelatihan untuk meningkatkan IP ASN BPBL Lombok

### **14. IKU Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

Unit Kerja yang berpredikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan sebelumnya adalah masih belum dilakukan rapat lanjutan pembangunan ZI pada Triwulan III Tahun 2024

Perbaikan yang dilakukan pada Triwulan ini adalah melaksanakan rapat WBK dengan tim pembangunan ZI yang baru.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III ini belum dilakukan penghitungan penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Pembangunan ZI pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu belum dilakukan perhitungan karena capaian di akhir tahun

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

#### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan III Tahun 2024 ini adalah melakukan monitoring atas pengisian WBK BPBL Lombok

Tindak lanjut ke depannya adalah memonitoring hasil pengisian WBK BPBL Lombok di *google drive* yang disediakan oleh eselon I DJPB

### **15. IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok**

Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPBL Lombok.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan ini belum ada LHP BPK yang harus diselesaikan, meskipun demikian tindak lanjut ke depannya adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III ini belum dilakukan penghitungan Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Prosentase penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu belum dilakukan perhitungan karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

#### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

tidak ada masalah yang berarti, dan tindak lanjut ke depannya adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **16. IKU Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian PM SAKIP yang dilakukan melalui LKE Inspektorat Jenderal dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5

aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Tidak ada permasalahan pada triwulan sebelumnya, meskipun demikian BPBL Lombok tetap menyusun laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat pada waktunya.

### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2023 ini belum dilakukan penghitungan nilai PM SAKIP BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun namun demikian BPBL Lombok mengikuti bimtek SAKIP dan melakukan sosialisasi SAKIP kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai mengenai SAKIP, berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut :



Gambar 13. Dokumentasi kegiatan bimtek dan sosialisasi SAKIP

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU PM SAKIP pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu belum dilakukan perhitungan karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

#### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti pada Triwulan ini, Tindak lanjut triwulan berikutnya adalah BPBL Lombok tetap menyusun Laporan kinerja dan evaluasi kinerja tepat pada waktunya.

### **17. IKU Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)**

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Permasalahan pada Triwulan sebelumnya adalah BPBL Lombok belum menyelesaikan 11 temuan dari 25 temuan.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan ini adalah menyelesaikan 11 temuan tersebut dan saat ini sisa 2 temuan yang belum terselesaikan.

**Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan surat dari sesditjen perikanan budidaya nomor B.6964/DJPB.1/HP.620/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” Triwulan III Tahun 2024, nilai BPBL Lombok sebesar 96% dari target 80%.

**Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2024 naik sebesar 2.86 % dibandingkan pada Triwulan III Tahun 2023. adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Nama Indikator : Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok						
Triwulan III Tahun 2024			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2024 thd Triwulan III Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan III Tahun 2023			Target Tahunan (%)
80	96	120.00%	93.33	2.86	80	120.00%

Adapun sejak Tahun 2019, IKU Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok baru dilakukan penilaian pada Tahun 2020. Berikut adalah perkembangan Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejak tahun 2019 :

**Tabel 30. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja**

realisasi					2024		
2019	2020	2021	2022	2023	target	realisasi	% capaian
-	100	90.57	100	100	80	96	120.00%

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

Berikut adalah tabel perbandingan Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB dimana capaian BPBL Lombok lebih rendah dibandingkan BPBL Ambon, BPBL Batam, namun lebih tinggi dari BBPBL Lampung.

**Tabel 31. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT DJPB**

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase
BPBL Lombok	80	96	120.00
BPBL Ambon	80	100	125.00
BPBL Batam	80	100	125.00
BBPBL Lampung	80	92.68	115.85

### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Permasalahan pada Triwulan ini adalah meskipun BPBL Lombok telah mencapai target dari IKU ini, namun masih ada 2 temuan yang belum terselesaikan.

Tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah menyelesaikan sisa 2 temuan tersebut

## **18. IKU Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%);**

Nilai IKPA adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan

fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti pada Triwulan ini, meskipun demikian dalam triwulan ini tetap dilaksanakan pertemuan secara intensif tiap bulan dalam pengisian capaian output.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan nilai IKPA Satker BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU nilai IKPA Satker BPBL Lombok pada Triwulan III Tahun 2024 sama dengan Triwulan III Tahun 2023 yaitu belum dilakukan perhitungan karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

#### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti, namun Triwulan berikutnya merupakan pengisian final atau akhir tahun sehingga harus dilakukan pengisian capaian output secara cermat di aplikasi SAKTI

## 19. IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok (%)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART DJA.

Pada aplikasi SMART DJA, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan sebelumnya tidak ada permasalahan, namun demikian pengisian SMART hingga saat ini masih terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sehingga dibutuhkan berkoordinasi dengan operator komitmen dalam hal pengisian capaian output aplikasi SAKTI.

### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok karena capaian di akhir tahun.

### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena capaian di akhir tahun.

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti, namun Triwulan berikutnya merupakan pengisian final atau akhir tahun sehingga harus memperhatikan secara detail dalam pengisian capaian output di aplikasi SAKTI karena akan berdampak pada aplikasi SMART DJA

## **20. IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa (%);**

IKU tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Lombok diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)
2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)
3. Paket pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)
4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)
5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)

6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
- 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
- 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
- 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit yang bersangkutan (15%)
- 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti, meskipun demikian tim PBJ tetap menyusun dokumen-dokumen PBJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Nilai Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU nilai kepatuhan PBJ Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena capaian akhir tahun

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti, namun Triwulan berikutnya merupakan jadwal pengukuran untuk IKU Tingkat kepatuhan PBJ sehingga diperlukan penyusunan dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendapatkan nilai yang memenuhi target

## **21. IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok (%);**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (25%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (15%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (15%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (20%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (25%).

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 tidak ada permasalahan yang berarti, meskipun demikian BPBL lombok tetap menyusun dokumen BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Nilai Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Nilai Kepatuhan pengelolaan Branag Milik Negara Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023.

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

#### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan III Tahun 2024 masih belum terselesaikannya izin penghunian rumah dinas, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menyelesaikan izin penghunian rumah dinas dengan berkoordinasi dengan sekretariat Ditjen PB.

## **22. IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)**

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan III ini adalah masih seringnya aplikasi error

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan III ini adalah berkoordinasi dengan TIM DJPB dan PUSDATIN terkait kendala pada Aplikasi KUSUKA.

### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA karena capaian di akhir tahun.

### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Persentase pelaku usaha yang terintegrasi KUSUKA pada Triwulan I Tahun 2023 ini belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena capaian di akhir tahun.

### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan III ini adalah masih seringnya aplikasi error sedangkan pada triwulan berikutnya merupakan jadwal pengukuran IKU sehingga tindak lanjut ke depannya adalah berkoordinasi dengan TIM DJPB dan PUSDATIN terkait kendala pada Aplikasi KUSUKA.

## **23. IKU Indeks pengelolaan kepegawaian**

IKU indeks Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama

dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan pada Tahun 2023 adalah bahwa sempat dalam aplikasi e-Kinerja BKN kepala balai yang lama masih teregister sebagai kepala balai BPBL Lombok namun hal tersebut dapat terselesaikan dengan dengan koordinasi dengan bagian SDMAO DJPB.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan ini belum ada permasalahan yang berarti, namun dari struktur organisasi pegawai BPBL Lombok belum memiliki jabatan arsiparis sehingga pada tahun ini diusulkan jabatan arsiparis untuk penerimaan pegawai baru

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan penghitungan Indeks pengelolaan Kepegawaian karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU Indeks pengelolaan kepegawaian pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena capaian di akhir tahun

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti, meskipun demikian BPBL Lombok tetap menyusun dokumentasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **24. IKU Nilai Pengawasan kearsipan ;**

Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

Pada Triwulan sebelumnya tidak ada permasalahan yang berarti, namun BPBL Lombok hingga saat ini belum mempunyai jabatan arsiparis sehingga nilai pengawasan kearsipan BPBL Lombok masih belum cukup baik.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan ini adalah pengelola persuratan tetap menjalankan fungsinya sebagai pengelola surat dan arsiparis dan melaksanakan kegiatan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan penilaian pengawasan kearsipan karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU pengawasan kearsipan Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023 karena capaian di akhir tahun.

#### **Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

#### **Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Pada Triwulan ini belum ada permasalahan yang berarti, namun pengelola persuratan di BPBL Lombok hingga saat ini tetap melaksanakan kegiatan persuratan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **25. IKU Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok;**

Persentase layanan perkantoran pusat merupakan kualitas layanan perkantoran di satker BPBL Lombok dimana IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada Tahun 2024.

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan sebelumnya**

permasalahan pada Triwulan sebelumnya adalah akan dilaksanakannya penilaian pelayanan publik.

Perbaikan yang sudah dilaksanakan pada Triwulan ini adalah melakukan koordinasi antara subbagian umum dan tim pelayanan publik untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan publik.

#### **Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan**

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum dilakukan perhitungan prosentase layanan perkantoran karena capaian di akhir tahun, namun demikian pada triwulan ini sudah

dilaksanakan penilaian pelayanan publik dimana BPBL Lombok memperoleh nilai 4,56 atau dinyatakan pelayanan prima

**Perbandingan dari waktu ke waktu**

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

**Perbandingan antar sub unit kerja**

IKU ini belum dapat dibandingkan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun.

**Alokasi Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini

**Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya**

Tidak ada permasalahan yang berarti pada Triwulan III Tahun 2024, namun demikian BPBL Lombok tetap melaksanakan layanan perkantoran baik secara internal maupun eksternal.

**3.1. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN**

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya laut mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 27.957.854.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu rupiah) dan dari dana yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 20.334.642.179 atau 72,73% dari pagu.

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

EXCEL PDF FILTER

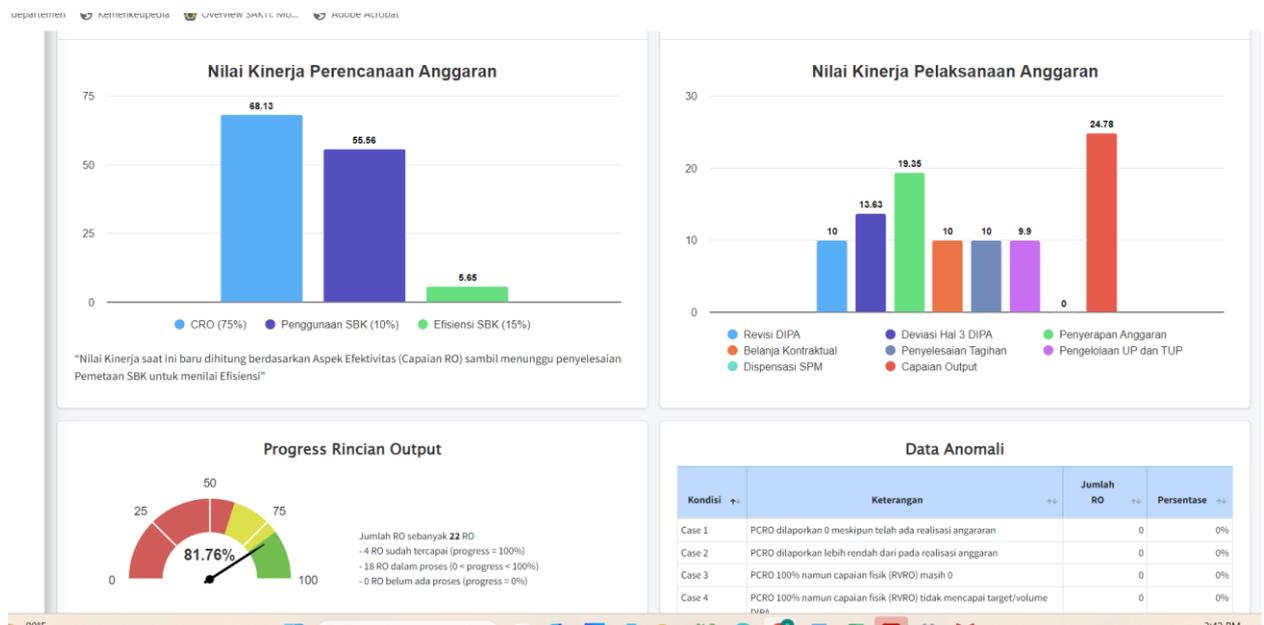
FILTER: PERIODE | JANUARI S.D. SEPTEMBER CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE   NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	567762   BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	PAGU	7,893,990,000	19,865,684,000	198,180,000	0	0	0	0	0	0	0	27,957,854,000
		REALISASI	5,842,406,944 (74.01%)	14,326,923,260 (72.12%)	165,311,975 (83.42%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	20,334,642,179 (72.73%)
GRAND TOTAL			PAGU	7,893,990,000	19,865,684,000	198,180,000	0	0	0	0	0	0	27,957,854,000
			REALISASI	5,842,406,944 (74.01%)	14,326,923,260 (72.12%)	165,311,975 (83.42%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	20,334,642,179 (72.73%)
			SISA	2,051,583,056	5,538,760,740	32,868,025	0	0	0	0	0	0	7,623,211,821

Gambar 14. Screenshot aplikasi OMSPAN

### 3.2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Pada Triwulan III Tahun 2024 ini nilai efisiensi BPBL Lombok adalah 5,65%



Gambar 15. Screenshot aplikasi SMART DJA

## BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Pada Triwulan III Tahun 2024, hasil pengukuran dan analisa yang dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada seluruh indikator-indikator utama (IKU) yang menjadi target BPBL Lombok didapatkan hasil dari total 25 IKU, sebanyak 6 indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan dan 19 indikator kinerja perhitungan di akhir tahun atau semester II.

Selanjutnya, dalam mempercepat dan meningkatkan kinerja BPBL Lombok di tahun-tahun kedepan beberapa upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan, antara lain: (i) menyelesaikan bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat dan menyelesaikan saran rekomendasi itjen yang belum terselesaikan.

Akhirnya, Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian-capaian output dari IKU yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala BPBL Lombok. Lebih lanjut lagi, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan/ input dalam merumuskan kebijakan baik di level UPT maupun di tingkatan yang lebih tinggi (level pusat) di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BPBL Lombok Triwulan III Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN 1**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**  
Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya  
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

**Tb. Haeru Rahayu**

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut  
Lombok

**Wawan Cahyono Ashuri**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	1. Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rupiah)	781.085.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	3.476
		5. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Persen)	75
		7. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (Persen)	100
		8. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan (Persen)	100
		9. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan (Persen)	100
		3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi (Parameter)	7
		12. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Persen)	85
		14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15. Prosentase Penyelesaian LHP BPK Atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	100
		16. Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	82
		17. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	80
		18. Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	93,76
		19. NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	86
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Nilai)	80
		22. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Terintegrasi dengan Data KUSUKA (Persen)	80
		23. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		24. Nilai Pengawasan kearsipan (Nilai)	75
		25. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok (Persen)	80

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut  
Lombok

Wawan Cahyono Ashuri

**DATA ANGGARAN :**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	3.846.476.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	461.289.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	12.150.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	12.140.089.000
<b>Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok Tahun 2024</b>		<b>28.597.854.000</b>

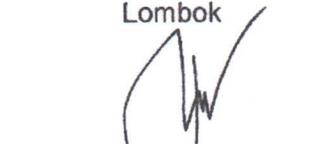
Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



**Tb. Haeru Rahayu**

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut  
Lombok



**Wawan Cahyono Ashuri**

# **LAMPIRAN 2**

## **DATA DUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

Nomor : B.6908/DJPB.1/KU.340/X/2024 09 Oktober 2024  
Sifat : -  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB  
Triwulan III Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2024, bersama ini disampaikan Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Diperoleh dari jumlah Pendapatan Fungsional dan Umum Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB periode 1 Januari 2024 s.d. 30 September 2024 (Triwulan III 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB pada periode pengukuran hingga periode Triwulan III Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar **96,62%** (sebesar **Rp.48.295.975.049** dari target PNBP DJPB sebesar **Rp. 49.985.496.000**).
3. Rincian capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari masing-masing UPT dan BLU DJPB disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.6908/DJPB.1/KU.340/X/2024

Tanggal : 09 Oktober 2024

### DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Kepala BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
2. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
3. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Kepala BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
6. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
7. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
8. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
9. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
10. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
13. Kepala BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
15. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

No.	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D CAPAIAN IKU	% SESUAI PK	S / D BULAN
1	2	3	4	5	6	7
		<b>REALISASI PENDAPATAN PNBP</b>				
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Pusat)	Rp 50.000.000	Rp 2.782.887.713	5565,78	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 50.000.000	Rp 369.024.999	738,05	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.413.862.714		
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp 27.358.090.000	Rp 10.097.755.411	36,91	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 27.358.090.000	Rp 366.655.484	36,55	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 9.633.081.897		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 98.018.030		
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp 4.500.400.000	Rp 3.798.777.567	84,41	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 4.500.400.000	Rp 68.258.575	84,24	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 3.723.085.358		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 7.433.634		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp 1.590.081.000	Rp 2.000.540.749	125,81	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.590.081.000	Rp 1.990.929.419	125,21	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 9.611.330		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp 1.189.308.000	Rp 993.908.127	83,57	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.189.308.000	Rp 956.879.077	80,46	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 37.029.050		
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp 3.552.374.000	Rp 17.571.062.317	494,63	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 3.552.374.000	Rp 593.048.650	493,98	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 16.955.142.806		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 22.870.861		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp 1.555.000.000	Rp 1.593.054.593	102,45	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.555.000.000	Rp 1.523.476.000	97,97	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 69.578.593		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp 1.683.158.000	Rp 1.944.862.503	115,55	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.683.158.000	Rp 1.894.032.906	112,53	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 50.829.597		

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp 1.232.517.000	Rp 1.346.044.780	109,21	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.232.517.000	Rp 1.281.545.542	103,98	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 64.499.238		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp 1.274.795.000	Rp 1.035.924.577	81,26	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.274.795.000	Rp 970.525.558	76,13	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 65.399.019		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp 1.214.288.000	Rp 1.258.546.244	103,64	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.214.288.000	Rp 1.209.550.881	99,61	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 48.995.363		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Rp 1.212.600.000	Rp 758.127.543	62,52	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.212.600.000	Rp 755.412.716	62,30	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.714.827		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp 968.400.000	Rp 533.940.756	55,14	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 968.400.000	Rp 521.652.522	53,87	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 12.288.234		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp 781.085.000	Rp 1.046.684.993	134,00	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 781.085.000	Rp 879.289.743	112,57	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 167.395.250		
15	567800	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp 1.100.000.000	Rp 788.880.358	71,72	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.100.000.000	Rp 784.420.070	71,31	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 4.460.288		
16	445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeperangan Karangasem	Rp 723.400.000	Rp 744.976.818	102,98	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 723.400.000	Rp 744.473.348	102,91	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 503.470		
		<b>JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)</b>	<b>Rp 49.985.496.000</b>	<b>Rp14.909.175.490</b>	<b>90,47</b>	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN BLU (II)</b>		<b>Rp30.311.310.061</b>		
		<b>JUMLAH NON ANGGARAN (III)</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3.075.489.498</b>		
		<b>JUMLAH PENDAPATAN I + II + III</b>	<b>Rp 49.985.496.000</b>	<b>Rp48.295.975.049</b>	<b>96,62</b>	<b>CAPAIAN IKU</b>

REALISASI PRODUKSI CALON INDUK UNGGUL BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK  
 TW III TAHUN 2024

Produksi Calon Induk	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
Abalone				100			100	220					420
Ikan Hias							526		410				936
Tiram Mutiara						495			345				840
Kakap putih													-
Bawal Bintang													-
								Jumlah					2,196

Lombok Barat, 7 Oktober 2024



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi.,M.Pi.

**Capaian Realisasi Sampel Lab Keskanling Triwulan III Tahun 2024**  
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

**I. TARGET SAMPEL LAB KESKANLING BPBL LOMBOK**

965 sampel

**II. CAPAIAN SAMPEL LAB KESKANLING BPBL LOMBOK**

No.	Bulan	Target	Ruang Lingkup Uji					Jumlah	Kumulatif	Prosentase
			Kualitas Air	Molekuler	Mikrobiologi	Parasit dan Patologi	Residu			
1	Januari	77	230	5	1	2		238	<b>238</b>	24.66
2	Februari	79	457	39	5	5		506	<b>744</b>	77.10
3	Maret	59	317	8	17	4		346	<b>1090</b>	112.95
4	April	74	<b>124</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		152	<b>1242</b>	128.70
5	Mei	81	<b>222</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>16</b>		284	<b>1526</b>	158.13
6	Juni	86	<b>251</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>7</b>		323	<b>1849</b>	191.61
7	Juli	85	<b>426</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>		452	<b>2301</b>	238.45
8	Agustus	85	<b>165</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>26</b>		253	<b>2554</b>	264.66
9	September	88	<b>193</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		230	<b>2784</b>	288.50
10	Oktober	86						0		
11	November	85						0		
12	Desember	80						0		
<b>TOTAL</b>		<b>965</b>	<b>2385</b>	<b>196</b>	<b>121</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>2784</b>		<b>288.50</b>



Lombok Barat, 7 Oktober 2024

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi.

**Capaian Realisasi Sampel Lab AMR Triwulan III Tahun 2024**  
**Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

**I. TARGET SAMPEL AMR BPBL LOMBOK**  
35 sampel

**II. CAPAIAN SAMPEL AMR BPBL LOMBOK**

No.	Bulan	Target	Ruang	Jumlah	Kumulatif	Prosentase
			Lingkup Uji AMR			
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	3	14	14	14	40
3	Maret	3	2	2	16	45.71
4	April	2	2	2	18	51.43
5	Mei	3	1	1	19	54.29
6	Juni	3	1	1	20	57.14
7	Juli	4	5	5	25	71.43
8	Agustus	4	2	2	27	77.14
9	September	4	0	0	27	77.14
10	Oktober	3				
11	November	3				
12	Desember	3				
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>				



Lombok Barat, 7 Oktober 2024

Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

Nomor : B.6964/DJPB.1/HP.620/X/2024 11 Oktober 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 berkas  
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan III Tahun 2024

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 Juni 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan II Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 September 2024 (Triwulan III Tahun 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 90,18% (tuntas 597 dari 662 rekomendasi).
3. Data capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas  
Nomor : B.6964/DJPB.1/HP.620/X/2024  
Tanggal : 11 Oktober 2024

#### DAFTAR NAMA PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
2. Direktur Ikan Air Laut
3. Direktur Rumput Laut
4. Direktur Ikan Air Tawar
5. Plt. Direktur Ikan Air Payau
6. Kepala BBPBAP Jepara
7. Kepala BBPBL Lampung
8. Kepala BBPBAT Sukabumi
9. Kepala BPBAP Situbondo
10. Kepala BPBAP Takalar
11. Plt. Kepala BPBAT Sungai Gelam
12. Plt. Kepala BPBAT Mandiangin
13. Kepala BPBL Batam
14. Plt. Kepala BPBL Lombok
15. Kepala BPBL Ambon
16. Kepala BPBAP Ujung Batee
17. Kepala BPBAT Tatelu
18. Kepala BLUPPB Karawang
19. Kepala BPIUUK Karangasem
20. Kepala BPKIL Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Lampiran Surat Dinas  
Nomor : B.6964/DJPB.1/HP.620/X/2024  
Tanggal : 11 Oktober 2024

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil  
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"  
Triwulan III Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	80,95%
2	Direktorat Ikan Air Laut	88,57%
3	Direktorat Rumput Laut	74,07%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	100,00%
5	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
6	BBPBAP Jepara	97,87%
7	BBPBL Lampung	92,68%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	85,71%
10	BPBAP Takalar	95,12%
11	BPBAT Sungai Gelam	80,00%
12	BPBAT Mandiangin	80,36%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	96,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	100,00%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	95,89%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Gemi Triastutik